



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2021/PA.Tli



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan:

Haeruddin bin Baco, tempat dan tanggal lahir Barru, 20 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Perintis, Dusun Perintis Desa Paddumpu, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli., selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orangtua calon suami anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 107/Pdt.P/2021/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang beridentitas :

Wahida binti Haeruddin, tempat lahir Soni, tanggal 06 Juni 2006 (umur 15 tahun 2 bulan), agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Jalan Perintis, Desa Paddumpu, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli.

Dengan calon suaminya :

Hal. 1 dari 15 Hal. Pntpn No.107/Pdt.P/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Asis Muliadi bin Makmur, tempat lahir Lenju, tanggal 07 Januari 1998 (umur 23 tahun 7 bulan), agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Dusun III Lenju, Desa Lenju, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli. ;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli dengan Surat Nomor: B-512 /Kua.22.03/04/PW.01/08/2021 dikeluarkan pada tanggal 06 Agustus 2021 ;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan dan telah di terima lamarannya, uang belanja pesta (Uang Panai) telah di terima oleh Pemohon sejak tanggal 5 Agustus 2021 dan rencana pernikahan akan di selenggarakan pada 5 Oktober 2021 serta hubungan mereka telah sedemikian eratnya ;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga ;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 15 Hal. Pntpn No.107/Pdt.P/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada Anak Pemohon yang bernama Wahida binti Haeruddin Umur 15 tahun 9 bulan untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Abd. Asis Muliadi bin Makmur. ;
3. Menetapkan biaya perkara` sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari orangtua calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya merestui rencana pernikahan tersebut, siap untuk membimbing, dan mensupport mereka;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orangtua calon suami anak Pemohon agar memahami resiko perkawinan terkait dengan kepentingan pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social, psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, atas nasehat Hakim Tunggal tersebut pihak-pihak terkait tetap ingin melanjutkan permohonan dispensasi kawin. Demikian juga Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Haeruddin** NIK: 7204012012700002, tertanggal 03 November 2020 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah

Hal. 3 dari 15 Hal. Pntpn No.107/Pdt.P/2021.



diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti (P.1);

- **Fotokopi Surat Keterangan Domisili** atas nama **Wahida** NIK: 7204075208030003, Nomor: 476/04.20/SKB-DP/VIII/Pem tertanggal 06 Agustus 2021 dari Kepala Desa Paddumpu Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti (P.2);

- **Fotokopi Kartu Keluarga** atas nama kepala keluarga **Haeruddin** Nomor 72040108081200027, tertanggal 02 November 2020, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti (P.3);

- **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** atas nama **Wahida binti Haeruddin** Nomor: 7204-LT-12042021-0001, tertanggal 12 April 2021 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti (P.4);

- **Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah**, atas nama **Wahida** NISN: 0067463659, tertanggal 12 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah DDI Paddumpu Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti (P.5);

- **Fotokopi Surat Keterangan Domisili** atas nama **Harson** Nomor: 141/1213/SKD-DL/VII/2021, tertanggal 12 Juli 2021 dari Kepala Desa Lenju Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti (P.6);

Hal. 4 dari 15 Hal. Pntpn No.107/Pdt.P/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Makmur** NIK: 7203140107780564, tertanggal 31 Januari 2013 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti **(P.7)**;

• **Fotokopi surat Keterangan Penolakan Pernikahan** dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli Nomor: B-512 /Kua.22.03/04/PW.01/08/2021, tertanggal 06 Agustus 2021, yang ditujukan kepada saudari **Wahida**. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti **(P.9)**;

• **Fotokopi surat Keterangan Berbadan Sehat** Nomor: 812/59.08/Puskot/Ket/VIII/2021 yang ditujukan kepada saudari **Wahida** dari UPT Puskesmas Kota Managaisaki, Kabupaten Tolitoli Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti **(P.10)**;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Saksi I, **Demmu bin Abd. Rauf**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jl. Sultan Hasanudin No.03, Desa Kalangkangan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa benar Wahida binti Haeruddin adalah anak kandung Pemohon yang berumur 15 tahun 2 bulan akan dinikahkan oleh Pemohon dengan laki-laki yang bernama Abd. Asis Muliadi bin Makmur;

Hal. 5 dari 15 Hal. Pntpn No.107/Pdt.P/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wahida binti Haeruddin sudah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan Abd. Asis Muliadi bin Makmur, bahkan sudah bertunangan pada 05 Agustus 2021;
- Bahwa anak Pemohon telah berhenti sekolah selama dua tahun dan walaupun tidak jadi menikah anak Pemohon pun tidak akan melanjutkan sekolah;
- Bahwa antara Wahida binti Haeruddin dan Abd. Asis Muliadi bin Makmur tidak ada hubungan keluarga atau hubungan saudara sepersusuan;
- Bahwa Baik Wahida binti Haeruddin maupun Abd. Asis Muliadi bin Makmur keduanya belum pernah menikah dan tidak sedang terikat dengan hubungan pernikahan dengan siapapun;
- Bahwa Wahida binti Haeruddin, saat ini telah mempunyai kesiapan untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa Abd. Asis Muliadi bin Makmur bekerja sebagai Petani dan berpenghasilan cukup, sehingga secara materi telah siap membina rumah tangga dengan anak Pemohon;
- Bahwa Wahida binti Haeruddin dan Abd. Asis Muliadi bin Makmur telah sepakat untuk menikah, dan tidak ada paksaan bagi keduanya untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa hal yang mendesak untuk menikah adalah hubungan keduanya sudah begitu erat, sehingga ditakutkan terjadi hal-hal yang terlarang
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui rencana pernikahan mereka berdua;
- Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena dirinya belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

2. Saksi II, **Hermawati binti Haeruddin**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Paddumpu, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 15 Hal. Pntpn No.107/Pdt.P/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa benar Wahida binti Haeruddin adalah anak kandung Pemohon yang berumur 15 tahun 2 bulan akan dinikahkan oleh Pemohon dengan laki-laki yang bernama Abd. Asis Muliadi bin Makmur;
- Bahwa anak Pemohon telah berhenti sekolah selama dua tahun dan walaupun tidak jadi menikah anak Pemohon pun tidak akan melanjutkan sekolah;
- Bahwa Wahida binti Haeruddin sudah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan Abd. Asis Muliadi bin Makmur, bahkan sudah bertunangan pada 05 Agustus 2021;
- Bahwa antara Wahida binti Haeruddin dan Abd. Asis Muliadi bin Makmur tidak ada hubungan keluarga atau hubungan saudara sepersusuan;
- Bahwa Baik Wahida binti Haeruddin maupun Abd. Asis Muliadi bin Makmur keduanya belum pernah menikah dan tidak sedang terikat dengan hubungan pernikahan dengan siapapun;
- Bahwa Wahida binti Haeruddin, saat ini telah mempunyai kesiapan untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa Abd. Asis Muliadi bin Makmur bekerja sebagai Petani dan berpenghasilan cukup, sehingga secara materi telah siap membina rumah tangga dengan anak Pemohon;
- Bahwa Wahida binti Haeruddin dan Abd. Asis Muliadi bin Makmur telah sepakat untuk menikah, dan tidak ada paksaan bagi keduanya untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa hal yang mendesak untuk menikah adalah hubungan keduanya sudah begitu erat, sehingga ditakutkan terjadi hal-hal yang terlarang
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui rencana pernikahan mereka berdua;

Hal. 7 dari 15 Hal. Pntpn No.107/Pdt.P/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena dirinya belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Wahida binti Haeruddin, umur 15 tahun 2 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Abd. Asis Muliadi bin Makmur, umur 23 tahun, karena keduanya sudah saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah demikian dekat, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut, bahkan keduanya telah bertunangan pada 05 Agustus 2021 dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dampal Selatan berdasarkan surat Nomor: B-512 /Kua.22.03/04/PW.01/08/2021, tertanggal 06 Agustus 2021 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orangtua calon suami anak

Hal. 8 dari 15 Hal. Pntpn No.107/Pdt.P/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar memahami resiko perkawinan terkait dengan kepentingan pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, atas nasehat Hakim Tunggal tersebut Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Wahida binti Haeruddin, maka berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, sampai P.9, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.9, merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. juncto Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai Juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai P.9 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi Ijazah Pendidikan, Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Fotokopi Surat Penolakan dari KUA, serta Fotokopi Surat keterangan Sehat sesuai maksud Pasal 5 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa P.1 sampai dengan P.7 merupakan fotokopi alat bukti surat yang menerangkan identitas Pemohon, anak Pemohon, dan pihak terkait, oleh karenanya Hakim Tunggal menilai lengkap syarat identitas yang dibutuhkan dalam perkara permohonan ini;

Hal. 9 dari 15 Hal. Pntpn No.107/Pdt.P/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Kekurangan Persyaratan/Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Dampal Selatan, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Keterangan sehat dari UPT Puskesmas Dampal Selatan, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti tentang status kesehatan jasmani dan rohani anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Demmu bin Abd. Rauf dan Hermawati binti Haeruddin di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Demmu bin Abd. Rauf dan Hermawati binti Haeruddin yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak

Hal. 10 dari 15 Hal. Pntpn No.107/Pdt.P/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, calon suami anak Pemohon, orangtua calon suami anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Wahida binti Haeruddin, saat ini berumur 15 tahun 2 bulan, dan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Abd. Asis Muliadi bin Makmur, berumur 23 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah menyatakan persetujuan untuk menikah tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon telah berhenti sekolah selama dua tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya saling cinta mencintai, dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, keduanya beragama Islam, serta tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa hal yang mendesak untuk menikah adalah hubungan keduanya sudah begitu erat, sehingga ditakutkan terjadi hal-hal yang terlarang
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan mereka, bahkan mereka sudah bertunangan pada 05 Agustus 2021;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dampal Selatan menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa setelah uraian fakta-fakta yang didapat dari persidangan perkara permohonan ini, Hakim Tunggal menyatakan perlu untuk mengemukakan kaidah-kaidah hukum yang berasal dari sumber-sumber hukum Islam yang mencakup al Quran, hadits, dan *qawaid al-fiqhiyyah*;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tolitoli dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadist Nabi sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول
الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من
استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن

Hal. 11 dari 15 Hal. Pntpn No.107/Pdt.P/2021.



للفرج ومن لم يستطع فعله بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Wahai para pemuda barangsiapa yang sudah mampu menikah, hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah, sebaiknya berpuasa saja, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi);

Hadits tersebut mengandung nilai bahwa menikah memerlukan kecakapan. Sehingga jika dinilai telah cakap, maka menikah adalah solusi untuk mengendalikan perilaku menyimpang, termasuk menjadi pengendalian kesucian kelamin yang berkaitan dengan kesehatan seksual masyarakat. Dalam hal ini, anak Pemohon dan calon suaminya telah mempunyai hubungan yang sangat dekat. Hal tersebut menjadi indikasi kuat yang mengarah pada terjadinya perbuatan terlarang tersebut. Padahal akan berbeda hukumnya, jika perbuatan tersebut dilakukan setelah menikah;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tolitoli juga menggunakan dasar firman Allah SWT Surat Annur ayat 32 yang artinya sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya. Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui";

Menimbang, bahwa selain kedua belah pihak keluarga telah menyatakan akan membimbing dan memberikan *support* pada calon mempelai, ternyata calon suami anak Pemohon juga telah mempunyai pekerjaan sebagai Petani dan telah berpenghasilan cukup, sehingga Hakim Tunggal menilai setidaknya dari segi kebutuhan ekonomi rumahtangga mereka pasca perkawinan akan tercukupi;

Menimbang, bahwa setelah paparan tentang sisi positif jika dikabulkannya dispensasi pernikahan anak pemohon. Selanjutnya sisi negatif

Hal. 12 dari 15 Hal. Pntpn No.107/Pdt.P/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkannya permohonan ini menurut Hakim Tunggal yaitu hilangnya kesempatan belajar anak, mental anak belum tertata, rawan terjadi kegagalan rumahtangga, dan secara medis menambah resiko angka kematian ibu dan bayi saat proses persalinan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal setelah melihat fakta-fakta hukum yang memaparkan berhadapannya sisi positif dan negatif jika dikabulkan atau ditolaknya permohonan ini, maka Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tolitoli menggunakan *qawaid al-fiqhiyyah* yang diambil alih sebagai pendapat hakim tunggal sebagai berikut:

الأخذ بأخف الضررين واجب

Artinya: *"Selektif mengambil pilihan pada hal yang mudlorotnya lebih kecil itu dihukumi wajib";*

Kaidah tersebut mengandung ajaran bahwa pilihan terbaik bisa jadi ada diantara hal-hal yang buruk. Dalam perkara ini ada dua kondisi yang oleh karenanya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan hal mana yang diyakini sebagai pilihan terbaik untuk selanjutnya dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan Pemohon atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, pertimbangan positif dan negatif di atas, serta telah terdapat cukup alasan sesuai ketentuan Pasal 6 Ayat (1), Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa lebih kecil *mudlorotnya* jika permohonan dispensasi kawin ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (Wahida binti Haeruddin) dengan calon suaminya (Abd. Asis Muliadi bin Makmur) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Dampal Selatan, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Setelah diberikannya dispensasi nikah bagi anak Pemohon ini, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi. Kemudian atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut segera melaksanakan pernikahan tersebut

Hal. 13 dari 15 Hal. Pntpn No.107/Pdt.P/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan dan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (Haeruddin bin Baco) untuk menikahkan anak Pemohon bernama Wahida binti Haeruddin dengan calon suaminya bernama Abd. Asis Muliadi bin Makmur;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp485.000,00(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1443 Hijriah oleh Nanda Trisna Putra, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Suwardi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Suwardi, S.H.

Nanda Trisna Putra, S.H.I

Perincian biaya :

- PNBP : Rp50.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp350.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Pntpn No.107/Pdt.P/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Pntpn No.107/Pdt.P/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)